

## GERAKAN TA'AWUN MUHAMMADIYAH: GERAKAN SOSIAL POLITIK ADILUHUNG

Muhammad Ridha<sup>1</sup>, Firdaus Syam<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup>Magister Ilmu Politik, Universitas Nasional  
Email: [muhammad.ridha80@gmail.com](mailto:muhammad.ridha80@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai manifestasi nilai ta'awun dalam organisasi Muhammadiyah yang telah sukses mengantarkan Organisasi Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan ribuan aset berupa lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga sosial dan berbagai lembaga sosial lainnya yang tiap tahun terus bertambah jumlahnya yang tentunya menjadikan Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat yang memiliki daya tawar politik dikancah nasional. Adapun penelitian ini menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan) yaitu metode penelitian yang datanya bersumber dari berbagai bahan bacaan antara lain jurnal, buku, dan berbagai bacaan lainnya yang relevan dengan judul yang akan di bahas. Adapun hasilnya ialah Muhammadiyah mampu menjadi kekuatan politik yang disegani pemerintah pusat dikarenakan gerakan ta'awun politik yang berorientasi pada *high politic* dan ta'awun kebangsaan dalam wujud dari manifestasi teologi Al-Ma'un dan Al'Asr dan semua dalam bingkai pandangan Muhammadiyah terhadap Pancasila sebagai *Darul Ahdi Was Syahadah*.

**Kata Kunci:** Muhammadiyah, Gerakan Ta'awun, Politik.

### Abstract

*This study discusses the manifestation of the value of ta'awun in the Muhammadiyah organization which has succeeded in bringing the Muhammadiyah Organization as one of the largest Islamic organizations in Indonesia with thousands of assets in the form of educational institutions, health institutions, social institutions and various other social institutions whose number continues to increase every year. Of course, making Muhammadiyah a community organization that has political bargaining power at the national level. This research uses the library research method, which is a research method whose data comes from various reading materials, including journals, books, and various other readings that are relevant to the title to be discussed. The result is that Muhammadiyah is able to become a political force that is respected by the central government because the political ta'awun movement is oriented towards high politics and ta'awun nationalism in the form of the theological manifestations of Al-Ma'un and Al'Asr and all within the framework of Muhammadiyah's view of Pancasila as Darul Ahdi Was Shahadah.*

**Keywords:** Muhammadiyah, Ta'awun Movement, Political.

### A. PENDAHULUAN

Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam yang sampai saat ini masih eksis dan bahkan terus melebarkan sayapnya sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dengan ribuan amal usaha berupa lembaga pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini hingga universitas, selain itu Muhammadiyah sebagai lembaga kesehatan berupa klinik hingga rumah sakit dan dalam bidang sosial ada ratusan lembaga sosial berupa panti asuhan, panti jompo dan beberapa lembaga sosial lainnya yang juga tersebar di seluruh Indonesia. Haedar Nashir pernah menyampaikan

dalam sambutannya pada Milad 112 Tahun Muhammadiyah, Haedar Nashir menyampaikan ada 163 universitas, 23 ribu PAUD dan TK, 348 pondok pesantren, 117 rumah sakit, 600 klinik kesehatan dan ribuan pendidikan dasar dan menengah (Kahfi, 2019).

Dari ribuan aset yang Muhammadiyah menurut Anwar Abbas selaku ketua bidang ekonomi PP Muhammadiyah mencapai 400 triliun (Mu'ti, 2019) tersebut tentunya menjadikan organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi yang memiliki kekuatan sosial dan politik yang kuat di Indonesia. Dalam konteks kepemiluan Muhammadiyah seolah menjadi agenda wajib para calon presiden untuk berkunjung dalam rangka meminta pandangan terkait keindonesiaan di masa mendatang dan tidak jarang juga secara tersirat setiap kandidat presiden meminta dukungan dari warga Muhammadiyah untuk memenangkan kontestasi politik pemilihan presiden.

Selain hal tersebut dalam pemerintahan pusat. Muhammadiyah seolah memiliki jatah menteri khusus dari presiden bahkan hingga hari ini pun kader terbaik Muhammadiyah masih menempatkan posisi Menteri melalui jalur Muhammadiyah. Hal tersebut tentunya menegaskan bahwa Muhammadiyah memang memiliki daya tawar politik di tingkat nasional.

Meskipun memiliki daya tawar politik di kancah nasional, tidak berarti Muhammadiyah adalah organisasi politik yang dengan gegabah mendukung salah satu calon presiden dalam setiap kontestasi pemilihan presiden. Muhammadiyah tetap pada khittahnya sebagai organisasi Islam yang berbasis sosial-keagamaan yang tidak berpolitik praktis. Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi Muhammadiyah karena tanpa ada upaya organisasi dalam mendukung salah satu presiden dan tetap berdiri ditengah-tengah ummat dengan tidak berpihak kepada salah satu calon presiden.

Meskipun tentunya dalam tubuh Muhammadiyah tentunya ada beberapa golongan kader yang ingin Muhammadiyah terlibat dan menyatakan sikap politiknya secara tegas (utami, 2019).

Karena Muhammadiyah sangat sadar akan resiko jika Muhammadiyah memilih salah satu calon presiden, maka Muhammadiyah akan terbawa ke *political game* dan dampaknya akan menjatuhkan Muhammadiyah pada *low political* (politik rendah) yang bertentangan dengan politik adiluhung (*high politic*) yang menjadi ciri khas Muhammadiyah. Adapun *high politik* yang dimaksud Muhammadiyah adalah politik luhur, politik nilai yang berdimensi kepada moral etis, sedangkan *low politic* adalah segala upaya yang dilakukan agar dapat meraih sebuah kekuasaan (Arif & Aulia, 2017), istilah tersebut merupakan asumsi dari politik yang sering didasarkan sebagai upaya dalam merebut kekuasaan seperti menggunting dalam lipatan yang jauh dari nilai-nilai luhur padahal politik pada hakikatnya ialah seni dalam berkompromi yang memiliki makna positif.

Namun meskipun politik tetap berada dalam jalur politiknya namun presiden tetap meminta Muhammadiyah untuk memandatkan kader terbaiknya berkontribusi dalam kabinet pemerintah presiden dalam setiap periode kepemimpinan Presiden RI.

Salah satu kader Muhammadiyah yang saat ini menjadi Menteri melalui rekomendasi PP Muhammadiyah adalah Muhadjir Effendy yang saat ini menjabat selaku Menteri Koordinator PMK. Keterpilihan kader Muhammadiyah sebagai salah satu pembantu presiden ialah tidak lepas dari profesionalitas, integritas dan kapabilitas dan tentunya track record Muhadjir Effendy selama menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama (Nur, 2021)

Tentunya pertimbangan presiden dalam memberikan jatah Menteri tidak lepas dari pengamatannya terhadap kematangan Muhammadiyah dalam menjalankan roda organisasi yang tiap tahun semakin berkembang dengan berbagai macam amal usaha yang di milikinya dan tidak hanya bertambah banyak namun amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah semakin berkembang. Banyak kampus Muhammadiyah yang awalnya hanya berstatus sekolah tinggi akhirnya meningkat dan berubah status menjadi universitas dan segala upaya tersebut tidak

lepas dari spirit ta'awun yang dimiliki Muhammadiyah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Latar Belakang Berdirinya Muhammadiyah**

Sebelum memasuki tahap mendalami spirit ta'awun mengetahui sejarah kelahiran Muhammadiyah tentunya menjadi hal yang penting untuk diketahui karena segala tindak tanduk sebuah organisasi tentunya tidak lepas dari latar belakang didirikannya organisasi tersebut. Muhammadiyah sendiri selaku organisasi Islam dan ketika berbicara latar belakang pendiriannya tidak lepas pula dari sosok K.H. Ahmad Dahlan selaku pendiri Muhammadiyah.

Pendalaman K.H. Ahmad Dahlan terkait Q.S. Al-Imran Ayat 103 yang memiliki arti “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar merekalah orang-orang yang beruntung” (Tanthowi, 2019). Ayat tersebutlah yang menginspirasi K.H. Ahmad Dahlan untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah sebagai wadah dalam menerapkan nilai-nilai Islam yang sebenarnya.

Faktor keterbelakangan dari akses pendidikan dan juga kemiskinan umat Islam pada masyarakat kauman jogja pada saat itu juga menjadi perhatian dari K.H. Ahmad Dahlan, meskipun pada saat itu tidaklah sedikit namun kebanyakan alim ulama di kauman jogja hanya berorientasi pada sektor ilahiah atau ketuhanan tanpa menjadikan sektor sosial pendidikan sebagai aktivitas dakwah dari para ulama. Alim ulama sangat disibukkan dengan aktivitas ritual semata yang tidak berdampak kepada kesejahteraan masyarakat kauman pada saat itu.

Bagi K.H. Ahmad Dahlan peran seorang alim ulama tidak hanya memikirkan aktivitas ritual semata tanpa memikirkan kondisi sosial masyarakat. Maka dari itu Muhammadiyah memulai aktivitas dakwahnya melalui kegiatan pengajian di langar kidul dan akhirnya membuat sebuah *Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah*.

Madrasah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan ini cukup berbeda dengan madrasah pada umumnya, karena memadukan antara kemajuan ilmu pengetahuan umum dan keimanan sehingga dapat membangun citra Islam yang selama ini dikesankan oleh Pendidikan Belanda sebagai agama yang terbelakang, namun tidak hanya sampai disitu K.H. Ahmad Dahlan mendirikan Lembaga PKO (Penolong Kesengsaraan Ommat) yang aktivitasnya adalah untuk membantu orang-orang miskin dan anak yatim, selain itu K.H. Ahmad Dahlan membuat pengajian perempuan yang nantinya menjadi cikal bakal Organisasi sayap Muhammadiyah yaitu Aisyah, mendirikan Hizbul Wathan untuk melatih kedisiplinan kader Muhammadiyah yang dalam prosesnya telah melahirkan jendral pertama Republik Indonesia yaitu Jendral Soedirman (Tanthowi, 2019).

### **2. Semangat Ta'awun Warga Muhammadiyah**

Kehebatan Organisasi Muhammadiyah dalam menjaga kebersamaan antara warganya mampu mengantarkan Muhammadiyah mencapai usia lebih dari seratus tahun. Hal tersebut tentunya butuh sebuah perjuangan yang tidak mudah karena tentunya setiap zaman memiliki tantangan yang berbeda-beda Muhammadiyah melalui berbagai zaman mulai dari sejak zaman kolonial Belanda / Pra-kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru sampai Reformasi saat ini.

Di sini peran semangat ta'awun warga Muhammadiyah dari berbagai sektor kehidupan sosial-agama menjadi kunci keberhasilan bertahannya Muhammadiyah melalui berbagai zaman tersebut. Ta'awun sendiri berasal dari Bahasa Arab berarti saling tolong menolong atau dalam terminologi Indonesia biasa diistilahkan gotong royong. Terminologi Ta'awun sendiri berasal dari Bahasa arab yang berarti tolong menolong. Muhammadiyah mengambil istilah ini berdasarkan refleksi dari Q.S. Al-Maida ayat 02 yang berbunyi “.... Dan saling tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat

dosa dan permusuhan” ayat tersebut menjadi spirit kekuatan dari semangat gotong royong bagi warga Muhammadiyah untuk terus berkontribusi dalam membangun Negara (Nashir, 2000)

Peran Muhammadiyah sedari awal lahirnya selain melakukan reformasi, Muhammadiyah memang telah menunjukkan eksistensinya sebagai gerakan sosial kemanusiaan. Namun dalam perjalanan Organisasi Muhammadiyah semangat ta’awun tersebut akhirnya menjadi sebuah spirit yang menjadikan Muhammadiyah sebagai organisasi yang memiliki total aset ratusan triliun dan akhirnya memiliki daya tawar politik dalam pemerintahan. Meskipun Muhammadiyah tidak meminta jabatan Menteri kepada presiden di berbagai rezim, Muhammadiyah selalu ditawarkan oleh presiden hingga saat ini (Syahputra, 2014).

### 3. Ta’awun Politik

Meskipun Muhammadiyah tetap berdiri tegak sebagai Gerakan sosial keagamaan, bukan berarti Muhammadiyah anti atau apatis terhadap politik kebangsaan terutama di Indonesia. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa Muhammadiyah telah lahir bahkan sejak zaman kolonial Belanda dan setiap zaman tentunya Muhammadiyah akan bersinggungan dengan perpolitikan dan alhamdulillah sampai era reformasi Muhammadiyah masih mampu bertahan bahkan amal usahanya semakin terus bertambah hingga memiliki triliunan aset.

Hal tersebut mampu dicapai oleh Muhammadiyah dikarenakan cara Muhammadiyah memainkan peran politiknya sebagai organisasi sosial keagamaan, Muhammadiyah yang sudah “sangat kenyang” dalam pengalaman politik kebangsaan tetap konsisten dalam menjalankan *high politic*-nya yaitu politik yang berdimensi kepada etika moral, dan tidak menjalankan gaya *low politic* yaitu politik rendahan yang melakukan berbagai upaya agar mampu mencapai jabatan politik. Karena sebagaimana yang kita ketahui Bersama dalam perpolitikan kebangsaan di Indonesia tidak jarang menggunakan cara-cara yang tidak berlandaskan kepada moral etik, semisal politik uang, kampanye hitam yang berupaya agar menjatuhkan lawan politik dengan merusak reputasinya dan berbagai cara lainnya yang tidak dibenarkan oleh moral etik.

Selain itu ketegasan Muhammadiyah sebagai organisasi yang tetap berada ditengah dan tidak memposisikan diri berpihak kepada salah satu kandidat presiden dan tetap berperan sebagai pemberi petunjuk kepada tiap calon presiden, membuat Muhammadiyah disegani oleh tiap kandidat presiden. Karena tentunya setiap calon presiden sadar bahwa Muhammadiyah besar bukan dari sokongan pemerintah semata namun ada Gerakan masyarakat yang bergotong royong dalam membesarkan organisasi Muhammadiyah sehingga Muhammadiyah mampu menjadi organisasi besar dan bahkan menjadi organisasi Islam terkaya di Dunia.

Hal tersebut tentunya membuat Muhammadiyah sebagai organisasi Masyarakat disegani oleh setiap calon presiden dan setiap pandangannya terkait politik kebangsaan menjadi rujukan bagi pemerintah dan hal tersebut tidak hanya berlaku di tingkat pusat namun hingga sampai tingkat daerah pandangan dari Muhammadiyah menjadi rujukan bagi kepemimpinan di daerah. Oleh karena itu bukan hal yang aneh jika Muhammadiyah tetap dipercaya oleh pemerintah untuk mengirimkan kader terbaiknya dalam mengisi kabinet menteri untuk membantu pemerintah menjalankan kepemimpinan tingkat nasional.

Gaya *high politic* digunakan oleh Muhammadiyah tidak lepas karena fungsi Muhammadiyah sebagai Gerakan dakwah dan tajdid (pembaharuan). Muhammadiyah sangat sadar bahwa jika organisasi terlibat dalam pergumulan politik kekuasaan maka besar kemungkinan ada guncangan konflik yang akan terjadi di dalam maupun di luar organisasi Muhammadiyah yang tentunya akan berdampak pada hilangnya kepribadian dan peran utamanya sebagai organisasi Islam yang bertugas untuk menyebarkan ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin (Miswanto, 2012).

Karena Muhammadiyah juga berkeyakinan bahwa dakwah di bidang pembangunan masyarakat tidak kalah penting dan strategis disbanding dengan bidang kekuasaan.

#### **4. Ta'awun Kebangsaan**

Ta'awun kebangsaan yang dimaksud adalah upaya-upaya yang dilakukan Muhammadiyah dalam membangun peradaban madani (*civil society*) / yang dalam terminologi Muhammadiyah biasa disebut dengan peradaban utama (Syarifuddin et al., 2019). Muhammadiyah memiliki dua etos atau yang dalam Muhammadiyah sering disebut teologi. Adapun teologi tersebut adalah Teologi Al-Maun dan Teologi Al-Ashr, Teologi Al-Maun adalah teologi yang mendorong kader-kader Muhammadiyah agar betul-betul mengaktualisasikan nilai-nilai sosial dalam hidupnya dan dalam menjalankan organisasi Muhammadiyah.

Teologi ini berlandaskan kepada kefahaman isi salah satu surat dalam Al-Qur'an yaitu Q.S. Al-Maun. K.H. Ahmad Dahlan mengajarkan bahwa kita tidak hanya selesai dalam menghapuskan ayat-ayat dalam surat Al-Maun namun juga harus berusaha mengamalkan isi dari surat tersebut. Adapun isi kandungan dari Q.S. Al-Maun adalah tentang mengoptimalkan Gerakan sosial dalam bentuk menyantuni anak yatim dan memberi makan orang miskin.

Pengajaran K.H. Ahmad Dahlan tentang surat Al-Maun dilakukan selama berbulan-bulan sampai memastikan bahwa murid-muridnya faham dan mengaktualisasikan isi kandungan tersebut yang akhirnya menjadi etos dari kader Muhammadiyah dalam menjalankan organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang berorientasi pada Gerakan sosial kemanusiaan.

Selain etos Al-Maun, etos Al-Ashr juga menjadi salah satu etos dalam Gerakan Muhammadiyah, etos ini berasal dari kefahaman terhadap isi dari kandungan Q.S. Al-Ashr yang diajarkan lebih lama dari Q.S. Al-Maun. Jika surat Al-Maun diajarkan sekitar tiga bulan oleh K.H. Ahmad Dahlan kepada murid-muridnya, surat Al-Ashr diajarkan lebih lama lagi yaitu sekitar tujuh sampai delapan bulan.

Hal tersebut mengisyaratkan bahwa teologi Al-Ashr merupakan hal yang vital dalam pergerakan Muhammadiyah, teologi Al-Ashr menitik beratkan kepada upaya-upaya agar kader-kader Muhammadiyah memaksimalkan waktu yang ada untuk meningkatkan kecerdasan spiritual, intelektual dan emosional agar mampu memahami Islam lebih dalam dan mampu mewujudkan peradaban Islam yang utama di masa mendatang.

Dari Teologi Al-Ashr inilah menjadikan Muhammadiyah identik dengan Istilah sebagai Organisasi Islam Berkemajuan. Tentunya hasil dari aktualisasi teologi ini bisa dibuktikan dengan mampunya Muhammadiyah menghadirkan Lembaga Pendidikan tinggi berdaya saing global bahkan dalam salah satu survey Perguruan tinggi Muhammadiyah yaitu Universitas Muhammadiyah Malang menjadi Universitas Terbaik Islam Tingkat Dunia bahkan dalam menjawab tantangan Global Muhammadiyah sudah mulai menghadirkan perguruan tinggi di luar negeri yaitu Malaysia dan Australia.

#### **5. Pandangan Muhammadiyah Terhadap Pancasila Sebagai *Darul Ahdi Wasyahadah***

Istilah Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah ini setidaknya menjadi sebuah keputusan organisasi Muhammadiyah yang termaktub dalam Tanfidz Muhammadiyah ke-47 di Makassar (Muhammadiyah, 2015). Istilah tersebut merupakan wujud komitmen ke-Islaman dan ke-Indonesiaan Muhammadiyah, Adapun pandangan Negara Pancasila sebagai darul Ahdi Wasyahadah berangkat dari tiga Aspek, *Pertama*, masih ada kelompok masyarakat yang masih mempertanyakan tentang relasi antara Islam dan Negara dan mempertanyakan terkait

Ideologi Pancasila dalam bernegara. *Kedua*, adanya kenyataan di masyarakat bahwa Pancasila sebagai ideologi belum mampu membuat penjelasan akademik mengenai negara Pancasila.

*Darul Ahdi* dimaknai sebagai sebuah kesepakatan yang berarti Muhammadiyah menyepakati bahwa Pancasila adalah rumusan dan kompromi dari para pendiri bangsa terutama yang terlibat langsung dalam lembaga BPUPKI dan PPKI sehingga kesepakatan mereka melahirkan negara Indonesia, maka seluruh warga Muhammadiyah yang juga merupakan warga Indonesia wajib untuk menjaga kesepakatan tersebut.

Sebagai wujud komitmen Muhammadiyah dan warganya ialah dengan terlibat langsung dalam upaya-upaya dalam membangun negara di berbagai sector baik politik, sosial, budaya keagamaan dan lainnya dan juga melibatkan segala amal usaha Muhammadiyah maupun kader-kader Muhammadiyah dalam pengambilan keputusan bernegara maupun aktivitas sosial kemasyarakatan.

Sedangkan konsep *Darus Syahadah* yang berarti negara persaksian, dalam hal ini Muhammadiyah ingin menyampaikan bahwa Muhammadiyah melalui ajaran Islam yang berkemajuan mampu mengantarkan negara Indonesia menuju negara yang berkemajuan apalagi Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam mayoritas, maka pandangan bangsanya terhadap ajaran Islam sangat menentukan karakter dari negara tersebut. Oleh karenanya Muhammadiyah akan selalu hadir untuk memberikan pemahaman Islam yang berkemajuan demi mewujudkan Indonesia yang berkemajuan.

Selain itu dalam wujud *Darus Syahadah* Muhammadiyah dirasa perlu untuk terlibat dalam mengambil keputusan terkait penyelenggaraan negara dan pembangunan moral dan karakter bangsa antara lain penyusunan undang-undang dan berbagai keputusan negara lainnya. Pandangan Muhammadiyah tentang Pancasila sebagai *Darul Ahdi Was Syahadah* inilah menjadi bingkai dalam upaya menjadikan Muhammadiyah suatu Gerakan sosial yang diperhitungkan dalam perpolitikan Nasional, karena kontribusinya yang sangat jelas untuk memajukan bangsa dalam berbagai amal usaha yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah.

Keselarasan Muhammadiyah dengan Indonesia dalam melahirkan generasi bangsa yang dapat memajukan negara tentunya menjadi apresiasi bagi pemerintah, karena tidak sedikit organisasi / komunitas berbasis Islam yang memberikan faham Islam kepada jama'ahnya yang terkesan dibenturkan kepada faham ke-Indonesiaan bahkan mengajarkan bahwa pemerintahan Indonesia adalah thogut (Masmuh, 2020).

### C. KESIMPULAN

Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi masyarakat/*civil society* dalam membangun kekuatan sosial politiknya menggunakan Gerakan Ta'awun atau dalam terminologi Indonesia disebut dengan gotong royong. Gerakan gotong royong dalam Muhammadiyah berlandaskan Q.S. Al-Maidah Ayat: 02 "...Dan saling tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan" ayat tersebut menjadi spirit kekuatan dari semangat gotong royong bagi warga Muhammadiyah untuk terus berkontribusi dalam membangun negara.

Semangat gotong royong/ta'awun Muhammadiyah kemudian direfleksikan dalam berbagai macam kegiatan sosial-keagamaan. Namun upaya sosial-keagamaan tentunya tidak lengkap jika tidak dibarengi dengan semangat tajdid agar Muhammadiyah mampu berdakwah diberbagai zaman sehingga akhirnya kita dapat menyaksikan dakwah Muhammadiyah masih eksis dan terus berkembang sampai saat ini.

Adapun upaya sosial-keagamaan yang didampingi dengan semangat pembaharuan tidak lepas dari bentuk internalisasi dua teologi dalam Muhammadiyah yaitu teologi Al-Ma'un dan Teologi Al-Ashr yang masing-masing teologi tersebut memberikan makna bagi pergerakan Muhammadiyah, pada teologi Al-Ma'un kader Muhammadiyah dikuatkan tentang pentingnya menyantuni orang miskin dan anak yatim dan dalam hal ini mencakup dimensi sosial-

keagamaan dan pada teologi Al-Ashr mengingatkan pentingnya menghargai waktu yang telah diberikan oleh Allah SWT yang menguatkan kader Muhammadiyah untuk selalu menghadirkan amal usaha yang selalu lebih baik kedepannya dan mampu berkompetisi dengan lembaga di tingkat International dan selalu mengikuti perkembangan zaman dan semua itu menjadi bentuk dari Ta'awun Kebangsaan dari ta'awun kebangsaan tersebut telah menjadikan Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat dengan aset yang terdiri dari 163 universitas, 23 ribu PAUD dan TK, 348 pondok pesantren, 117 pumah sakit, 600 klinik kesehatan dan ribuan pendidikan dasar dan menengah dengan total asset sekitar 400 trilion rupiah.

Adapun dalam ta'awun politik, Muhammadiyah memainkan model politiknya dalam bentuk *high politic* yaitu politik yang berdimensi pada moral-etik, bukan hanya *low politic* yang berorientasi hanya pada kekuasaan dan bahkan saling menjatuhkan demi mencapai posisi kekuasaan. Selain bentuk ta'awun kebangsaan dan ta'awun politik, Pandangan Muhammadiyah terhadap Pancasila sebagai *Darul Ahdi Was Syahadah*, telah memantapkan peran Muhammadiyah untuk terus hadir dalam mewujudkan Republik Indonesia yang berkemajuan sehingga energi yang tertuang dalam amal usaha Muhammadiyah tidak lepas dalam upaya mengisi kemerdekaan Republik Indonesia.

Dari nilai ta'awun kebangsaan dan ta'awun politik yang dibingkai dalam pandangan Muhammadiyah terhadap Pancasila sebagai *Darul Ahdi Was Syahadah* menjadi pondasi kekuatan Politik Organisasi Muhammadiyah sehingga Muhammadiyah selalu dimintai rekomendasi untuk mengirimkan kader-kadernya untuk menjabat 7abinet dalam 7abinet presiden dan tidak jarang pandangannya diminta dalam upaya pembangunan negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Kahfi, M. (2019). Muhammadiyah Gerakan Islam Berkemajuan: Selayang Pandang. *SIASAT*, 4(3), 39-46.
- Mu'ti, A. (2019). Ta'awun untuk Negeri: Konteks Keindonesiaan. Muhammadiyah University Press.
- Utami, P. S. (2019). Urgensi Internalisasi Nilai Kemuhammadiyah Berbasis Wawasan Kebangsaan dengan Konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 4(2), 62-70.
- Arif, D. B., & Aulia, S. S. (2017). Studi tentang negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah untuk penguatan materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Ahmad Dahlan. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 206-217.
- Nur, A. (2021). Fundamentalisme, Radikalisme dan Gerakan Islam di Indonesia: Kajian Kritis Pemikiran Islam. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 28-36.
- Tanhowi, P. U. (2019). Muhammadiyah Dan Politik: Landasan Ideologi Bagi Artikulasi Konstruktif. *Maarif Journal*, 14(2), 93-113.
- Nashir, H. (2000). *Perilaku politik elit Muhammadiyah*. Tarawang.
- Syahputra, H. (2014). Peran Politik Muhammadiyah Tahun 2010-2014. *Journal of Governance and Policy*, 1(1).
- Miswanto, A. (2012). Sejarah Islam dan Kemuhammadiyah. *Magelang: P3SI UMM*.
- Syaifuddin, M. A., Anggraeni, H., Khotimah, P. C., & Mahfud, C. (2019). Sejarah sosial pendidikan Islam modern di Muhammadiyah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 1-9.
- Muhammadiyah, P. P. (2015). Tanfidz Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-47. *Berita Resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah*, 80.
- Masmuh, A. (2020). Peran Muhammadiyah dalam Membangun Peradaban di Dunia. *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 15(1), 78-93.